

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1975, terjadi sebuah insiden yang disebut dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Insiden ini berdampak kepada masyarakat, terutama para mahasiswa yang terus-menerus melakukan aksi demonstrasi terhadap Pemerintahan Orde Baru. Awal terjadinya insiden Malari tersebut disebabkan oleh karena masyarakat menolak penanaman modal asing, terutama yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Peristiwa Malari 1975 bermula dari penyambutan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pertemuan dengan Presiden Soeharto. Para pengunjung rasa, terutama mahasiswa, menilai kebijakan pemerintah Orde Baru terlalu menguntungkan investasi asing. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk berdemonstrasi di jalanan. Demonstrasi yang awalnya damai, berakhir dengan kerusuhan dan memakan korban jiwa. Dalam kejadian tersebut, mahasiswa dituding sebagai dalang kerusuhan. Akhirnya, Presiden Soeharto langsung memberhentikan jenderal Soemitro yang menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Rizal, 2022).

Karena dampak dari peristiwa Malari tersebut, pada tahun 1975 lahirlah sebuah gagasan untuk menyusun Mata Pelajaran baru berupa Pendidikan Sejarah Perjuangan Nasional (PSPB). Pemerintahan Orde Baru menilai adanya demonstrasi yang dilakukan Masyarakat itu, khususnya mahasiswa, disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap Sejarah perjuangan nasional Indonesia. Sementara itu, mereka hanya mempelajari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Untuk itu, pemerintah Orde Baru berencana memasukkan mata pelajaran PSPB ke dalam kurikulum 1975. Namun, hal tersebut belum dilaksanakan karena generasi muda pada saat itu masih belajar mata pelajaran IPS Sejarah sebelum pergantian kurikulum berlangsung (Rizal, 2022).

Berdasarkan berbagai catatan, penyebab dimasukkannya mata pelajaran PSPB ke dalam Kurikulum 1984 adalah karena Ketidakpuasan Presiden Soeharto terhadap Kurikulum 1975. Saat itu mata pelajaran PSPB belum termasuk dalam mata pelajaran kurikulum 1975. (Kristina, 2021).

Saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nugroho Notosusanto meluncurkan kurikulum 1984. PSPB terdaftar sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum 1984. PSPB ditetapkan sebagai mata pelajaran mandiri dalam program Pendidikan Pancasila. Program Pendidikan Pancasila memuat mata pelajaran yang memuat ideologi kebangsaan dan pendidikan patriotik, seperti PSPB dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). (Moedjanto, 1983).

“Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ditetapkan status PSPB sebagai disiplin ilmu yang mandiri, bagian dari program pendidikan Pancasila” (Notosusanto, 1984).

Pada Masa Orde Baru, PSPB menjadi mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kini mata pelajaran tersebut telah dihapuskan dari kurikulum setelah kurikulum 1984 (Kristina, 2021). PSPB sebagai mata pelajaran wajib juga dimasukkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui TAP MPR RI Nomor II/MPR/1983 (Kristina, 2021). Dalam komponen pendidikan sosial budaya GBHN, mata pelajaran PSPB bertujuan untuk melanggengkan dan mengembangkan etos-etos, dan nilai-nilai kemandirian. (GBHN, 1983).

“Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah, baik negeri dan juga swasta, wajib mempelajari mata pelajaran PSPB” (GBHN, 1983).

Pendidikan sejarah merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Karena tujuan pengajaran sejarah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan atau arah yang ingin dicapainya. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan juga tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Jalur pendidikan

masyarakat Indonesia membuktikan hal tersebut. Tujuan pendidikan pada Masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan pada Masa Orde Baru. Begitu pula dengan rumusan tujuan pendidikan yang mengalami perubahan sejak masa Orde Baru hingga Masa Reformasi saat ini (Naredi, 2019).

Sejarah kebijakan pendidikan nasional yang terkandung dalam teks harus dipahami secara terpisah dari teks, yakni Ketetapan MPR No. II Tahun 1983 atau perintah GBHN atau Menteri Pendidikan. Namun ada teks tertentu di balik teks itu sendiri. Sebuah narasi besar dibangun di balik teks, yang mengasumsikan agenda ideologis, politik, dan sosial. Agenda ini diharapkan dapat mempengaruhi pemikiran, tindakan dan perilaku suatu bangsa atau negara secara turun-temurun. Pendidikan sejarah muncul pada masa kekuasaan rezim Orde Baru, dan para sejarawan dihadapkan pada kenyataan bahwa teks mengalami proses transformasi di tangan rezim Orde Baru itu sendiri. Dalam hal ini, ada yang menerimanya dan ada pula yang memilih melihat kembali kebenaran sejarah versi rezim Orde Baru. (Naredi, 2019)

Pendidikan sejarah Indonesia dibentuk sesuai ideologi politik pemerintah, sehingga cerita yang dikonstruksi sejak awal masuk dalam sejarah Indonesia versi pemerintah. Menurut teori kritis, pengajaran sejarah mengacu pada kekuatan yang mendasari, pengetahuan dan cara-cara historis untuk mengetahui model pendidikan dan hubungan sosial, identitas dan subjektivitas yang terkait dengannya. Perspektif ini menunjukkan beberapa posisi kritis yang berpendapat bahwa sejarah dan pendidikan bukanlah kegiatan yang netral, objektif, dan terdepolitisasi, melainkan bagian dari ideologi normatif sosial pemerintahan Orde Baru yang berupaya mengkonsolidasikan kekuasaannya. (Naredi, 2019)

Namun, peneliti kritis tidak hanya mempertanyakan isi dan materi sejarah serta kajiannya. Namun mereka juga mempertanyakan batasan antara teori dan sejarah, sejarah dan historiografi, sejarah dan ingatan, serta pembelajaran di dalam dan di luar sekolah. Pendekatan kritis berupaya melonggarkan batasan-batasan ini untuk mengeksplorasi cara-cara kompleks di mana sejarah

beroperasi dalam imajinasi publik. Atau pada tingkat kolektif atau individu dan bagaimana keduanya berbaur untuk menciptakan atau menolak makna (Segall et.al, 2018).

Kurikulum 1984 dikembangkan berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1983. Tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan umum yang berdasarkan pada sila Pancasila dan mengupayakan peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akal budi, keterampilan, budi pekerti, kepribadian serta pemantapan semangat kebangsaan yang dikuatkan oleh manusia yang mengembangkan diri dan membangun bersama. (Soedijarto, et.al, 2010). PSPB didaftarkan melalui TAP MPR nomor II/MPR 1983 dengan GBHN. (Naredi, 2019).

Sejak terdaftarnya mata pelajaran PSPB ke dalam mata pelajaran Kurikulum 1984 melalui unsur GBHN yang mempunyai legitimasi kuat, diluncurkan sebuah proyek penulisan buku sejarah yang sangat ideologis, politik, dan militer. Pedoman belajar PSPB digunakan secara sistematis pada semua jenjang pendidikan dasar, menengah (SD, SMP, SMA) dan pendidikan tinggi. PSPB merupakan mata pelajaran tersendiri dari pelajaran IPS (Gunawan, 1995).

Nugroho Notosusanto merupakan tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan pendidikan sejarah pada masa Orde Baru. Ia berperan penting dalam perencanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Nasional yang dimasukkan ke dalam GBHN. Nugroho Notosusanto saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Rektor Universitas Indonesia (UI) yang aktif di dunia sejarah militer. Pemikirannya sejalan dengan kepentingan pemerintahan Orde Baru, seperti pengawasan dan ancaman doktrinal anti komunis, perannya adalah sebagai presiden Pusat Sejarah ABRI, dahulunya Lembaga Sejarah Pertahanan dan Keamanan, serta mengajar di Lembaga Pertahanan Nasional. (Naredi, 2019)

Selain menjadi Ketua Pusat Sejarah ABRI, Nugroho juga mempunyai tanggung jawab besar pada tahun 1974, ketika ia dipercaya menyiapkan buku pelajaran sejarah untuk sekolah dasar dan menengah sebagai ketua kelompok penelitian Pusat Sejarah ABRI pada tahun 1974 -1975, Namun pada tahun 1970-1975 mulai dilaksanakan di perguruan tinggi. Hal ini mencakup evaluasi perpustakaan dan intervensi yang kuat dalam desain kurikulum sejarah di sekolah (McGregor, 2008). Peran pemerintahan Orde Baru adalah memastikan bahwa sejarah sebagai instrumen kekuasaan diajarkan kepada generasi muda di semua jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk merumuskan satu versi kerangka pemahaman Pancasila dan masyarakat. Buku ajar PSPB mencerminkan nilai-nilai semangat UUD 1945 sepanjang sejarah, bernuansa militeristik. (Naredi, 2019)

Narasi sejarah Indonesia pada masa Orde Lama maupun awal Orde Baru mengalami proses perubahan dari perspektif sosio-historis ke perspektif militer. Dimana baris perintah berada di satu tangan. Sejarah Indonesia identik dengan perjuangan militer. Perspektif militer mewarnai setiap teks sejarah, dalam hal ini adat istiadat, simbol dan lambang PSPB, salah satunya terdapat dalam buku teks PSPB. Bukti bahwa sejarah yang diajarkan di sekolah merupakan sejarah militeristik dapat dilihat pada materi PSPB Sekolah Menengah Pertama Kelas I berupa kata-kata yang mempunyai simbol-simbol seperti; "Pertempuran..., pertempuran..., perlawanan..., perang..., tentara..." Kata-kata ini merupakan tanda komando dan makna militeristik. Materi Sejarah Kewarganegaraan pada materi PSPB Kelas I SMA hanya ada 5 bab. Ini masih dalam konteks perang atau perlawanan. Di dalamnya juga jelas terdapat simbol-simbol, tanda-tanda militerisme bahkan sejarah kepolisian. (Naredi, 2019)

PSPB merupakan mata pelajaran yang dibentuk atau disusun untuk memperluas wawasan kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta untuk memiliki jiwa Bela Negara bagi siswa dimulai dari siswa jenjang SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Pertama dari rasa ketidakpuasan

Presiden Soeharto karena mata Pelajaran Sejarah Indonesia tidak masuk ke dalam daftar mata pelajaran di Kurikulum 1975 dan juga dampak dari Peristiwa Malari pada tahun 1974 dimana Mahasiswa dan Pemuda Indonesia terus menerus melakukan aksi demonstrasi karena Pemerintah Orde Baru berpikir bahwa mereka tidak pernah mendapatkan mata pelajaran Sejarah Indonesia. (Naredi, 2019)

PSPB juga dijadikan sebagai persyaratan kelulusan siswa untuk melanjutkan studi perkuliahan sebagai program Pendidikan umum. Standar isi atau materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah dimulai dari Masa Kolonial, Kedudukan Jepang 1942, Perang Kemerdekaan 1945, Penumpasan DI/TII 1948, Pemberontakan PKI Madiun, Serangan Umum 1 Maret 1949, dan Agresi Militer Belanda 1949. (Iskandar, 1987).

Namun pada tahun 1993, mata pelajaran PSPB dinyatakan gagal. Pasalnya, isi pelajaran sejarah bela diri populer yang dibuat oleh Nugroho Notosusanto berbeda dengan sejarah sebenarnya. Karena sejarahnya lebih mendukung atau berorientasi pada militer, khususnya TNI. Kegagalan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Nasional (PSPB) juga disebabkan oleh mundurnya Fuad Hassan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 karena adanya protes masyarakat. (umasih, 2010)

Dari peneliti itu sendiri, pentingnya judul tesis ini diangkat menjadi bagian dari penelitian tesis adalah agar mahasiswa yang membaca naskah tesis ini mampu berimajinasi akan deskripsi dan gambaran tentang bagaimana pembelajaran mata pelajaran Sejarah di masa Orde Baru serta dapat membedakan antara Pembelajaran Sejarah sesuai pemerintahan Reformasi dengan Pembelajaran Sejarah versi rezim Orde Baru, serta dapat membedakan antara sejarah perjuangan bangsa dengan sejarah umum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penelitian Sejarah mata pelajaran PSPB secara mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji

pembelajaran Era Orde Baru maupun PSPB. Beberapa sumber yang digunakan peneliti adalah artikel dan jurnal yang mengkaji PSPB pada masa lalu, yaitu Umasih (2010) yang berjudul *History Learning During the New Order*, PSPB dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru (2019) ditulis oleh Hari Naredi, Analisis Buku Teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Karya Aulia Novemy (2016), kemudian juga Perkembangan Kurikulum Indonesia Dari Masa ke Masa oleh Adelia Putri dan Hudaidah (2021) dan Pendidikan Kurikulum Indonesia (Tinjauan Filosofis Kritis) oleh Anzar Abdullah (2007).

B. PEMBATASAN PENELITIAN

Pembatasan Penelitian dalam tesis ini memiliki tiga aspek, yaitu pembatasan temporal, pembatasan spasial, dan pembatasan tematis.

Hasil deskripsi waktu atau pembatasan temporal didasarkan pada latar belakang ini. Batasan permasalahan atau batasan tahun penelitian mata pelajaran PSPB di sekolah menengah adalah dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993. Karena tahun 1983 merupakan tahun dilaksanakannya mata pelajaran PSPB di sekolah yang pada saat itu masuk dalam daftar mata pelajaran kurikulum 1984 hingga tahun 1993, mata pelajaran PSPB tidak lagi wajib dalam kurikulum.

Pembatasan penelitian secara spasial atau tempat, pelaksanaan mata pelajaran PSPB dilaksanakan di SMP. Dalam penelitian ini hanya menentukan pembatasan tempat dan daerah di SMP sekitar Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta saja.

Sedangkan pembatasan penelitian secara tematis atau terstruktur yaitu meneliti tentang alasan kenapa PSPB masuk ke dalam mata pelajaran kurikulum 1984, bagaimana cara guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PSPB di SMP, dan apa materi yang diajarkan dalam mata pelajaran PSPB untuk jenjang SMP dan sederajatnya.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah merupakan pertanyaan dari permasalahan yang harus dijawab untuk menyimpulkan hasilnya sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini. Pertanyaan Penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengapa PSPB ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib pada Kurikulum 1984 ?
2. Bagaimana Pelaksanaan mata pelajaran PSPB di SMP ?
3. Apa saja materi yang diajarkan dalam Pelaksanaan Mata Pelajaran PSPB di SMP ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Tesis merupakan deskripsi tentang alasan dan tujuan apa yang ditujukan untuk meneliti tentang pelaksanaan mata pelajaran PSPB harus diangkat sebagai judul tesis ini. Berikut adalah tujuan penelitian tesis yang mengacu pada Rumusan Masalah diatas sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan alasan mengapa mata pelajaran PSPB ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum 1984.
2. Menjelaskan bagaimana mata pelajaran PSPB dilaksanakan di sekolah, khususnya di SMP.
3. Menjelaskan isi dan materi pembelajaran PSPB yang diajarkan di sekolah, khususnya jenjang SMP.

E. KEBARUAN PENELITIAN (*STATE OF THE ART*)

State of The Art merupakan penelusuran literatur dari kajian-kajian yang relevan. Hasil pencarian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan dapat digunakan untuk menentukan posisi peneliti (Hanafi Ivan, Fuad Nurhatti, 2019). Ulasan makalah penelitian yang ditulis oleh peneliti diberikan pada uraian di bawah ini;

Kebaruan dari penelitian ini atau *State of the art* untuk membuktikan bahwa Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

bagaimana pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran PSPB dilaksanakan di sekolah menengah pertama antara tahun 1983 hingga 1993. Sementara itu, penelitian sebelumnya menyelidiki dan mendeskripsikan topik PSPB tetapi fokus pada dekonstruksi sejarah nasional Indonesia pada masa Orde Baru dan juga ilustrasi buku pelajaran PSPB di SD. Penelitian sebelumnya yang juga meneliti PSPB ditulis pada tahun 2008 oleh Anzar Abdullah. Abdullah (2008) menulis bagaimana pengembangan kurikulum di Indonesia merupakan bagian dari politik birokrasi dan reaksi tahunan guru tema PSPB dalam menyikapi perubahan kurikulum. Selebihnya penelitian dilakukan oleh Aulia Novemy (2016) yang membahas dan mendeskripsikan topik analisis PSPB sebagai buku pelajaran kelas 4 SD. Adeliya Putri dan Hudaidah (2021) yang membahas tentang bagaimana perjalanan dari perkembangan kurikulum di Indonesia dari kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum 2013 (kurtilas) secara umum. Hari Naredi (2019) mendeskripsikan tentang bagaimana mata pelajaran PSPB mengalami dekonstruksi atau perubahan fakta tentang Sejarah Nasional Indonesia di Masa Orde Baru. Umasih (2010) mendeskripsikan tentang bagaimana pembelajaran sejarah di masa orde baru secara umum.

Berdasarkan pada jurnal-jurnal yang telah dikaji tersebut di atas maka kebaruan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembelajaran PSPB di SMP. Pentingnya mata pelajaran PSPB bagi jenjang SMP yang dapat membentuk karakter dan pola pikir peserta didik menjadi karakter yang akan cinta tanah air. Karena masa SMP merupakan masa peralihan dari masa usia sekolah menuju masa remaja, sehingga peneliti dapat merumuskan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran PSPB di SMP Tahun 1983-1993”.